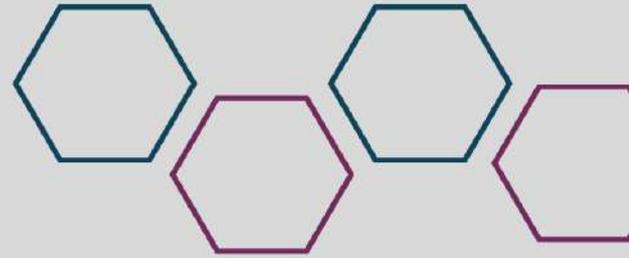




DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT



# RENJA 2023



## PENGANTAR

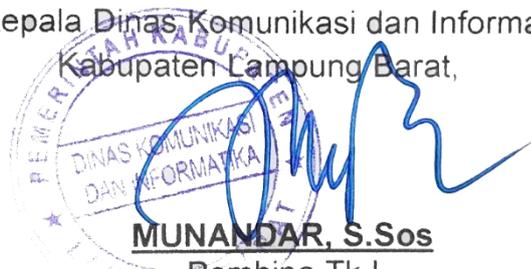
Puji Sukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, sehingga Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 dapat diselesaikan.

Dengan telah tersusunnya Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 ini, maka kami menyampaikan terimakasih kepada Narasumber yang telah banyak membantu hingga selesainya penyusunan RENJA ini.

Penyusunan RENJA ini telah diupayakan sebaik mungkin, walaupun demikian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua yang terlibat dalam penyusunan RENJA ini, dan atas kerjasama yang baik dari semua pihak kami ucapkan terima kasih.

Liwa, Februari 2022

Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Lampung Barat,



**MUNANDAR, S.Sos**

Pembina Tk.I

NIP.197007241996031003

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2017 Pasal 126 ayat (1), disebutkan bahwa Perangkat Daerah harus menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah paling lambat minggu pertama Bulan Desember. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (Renstra OPD) ke dalam rencana program dan penganggaran tahunan, serta menjembatani sinkronisasi dan harmonisasi Renstra ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur.

### **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan, Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
11. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 73 Tahun 2019 tanggal 01 Desember 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.

## **1.3 Maksud dan Tujuan**

### **1. Maksud**

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat adalah dalam rangka Menyusun rencana teknis kegiatan tahunan yang menjadi acuan pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja yang diemban oleh seluruh aparatur, yang dilaksanakan secara koordinatif dan terpadu dengan instansi terkait, Lembaga swadaya masyarakat, kalangan dunia usaha dan masyarakat, agar terwujud keberhasilan pelaksanaannya secara sinergi yang akan dibiayai oleh Dana APBD Kabupaten, APBD Propinsi dan APBN.

### **2. Tujuan**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Renja ini adalah:

- a. Menetapkan program dan kegiatan organisasi yang sejalan dengan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja, agar kegiatan pembangunan menjadi terpadu, terencana dengan baik, terarah dan efektif, mudah dipantau serta mudah diukur pencapaian hasilnya.
- b. Melakukan evaluasi serta analisis kinerja OPD pada tahun anggaran sebelumnya, agar seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat diketahui perkembangannya dan hambatannya sehingga dapat ditetapkan solusi terbaik untuk mengatasinya;
- c. Sebagai salah satu indikator di dalam evaluasi kinerja aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengelolaan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat; dan
- d. Sebagai salah satu bagian dari tindak lanjut pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Penulisan Rancangan Awal Renja OPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : Bab I merupakan Bab Pendahuluan yang berisikan dan membahas tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan.
- BAB II : Bab II merupakan Bab yang menguraikan tentang Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
- BAB III : Bab III merupakan Bab yang menguraikan tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, serta Program dan Kegiatan.
- BAB IV : Bab IV merupakan Bab yang berisikan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.
- BAB V : Bab V merupakan Bab yang berisikan penutup

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Untuk pencapaian Indikator Kinerja Utama pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2021 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan jumlah program termasuk program rutin sebanyak 5 Program dan jumlah kegiatan termasuk kegiatan rutin sebanyak 12 kegiatan. Alokasi dana tahun 2021 untuk belanja langsung sebesar Rp. 8.799.129.178,-,- terealisasi sampai dengan Bulan Desember 2021 sebesar Rp. 8.467.505.152,-,- Atau sebesar (96%).

Dari 47 Sub.Kegiatan kegiatan terdapat 1 (satu) Sub.kegiatan yang realisasi fisik atau kinerja keluarannya tidak mencapai 100% yaitu:

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dari Target Surat Masuk dan Keluar 1500 Surat, terealisasi 1050 Surat atau 70%, Hal ini disebabkan di masa pandemi aktivitas tata usaha perkantoran banyak dilakukan melalui daring dan surat elektronik (*paperlese*).

Rata-rata Pencapaian indikator keluaran sampai dengan bulan Desember tahun 2021, adalah sebesar 100%.

#### **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat adalah perangkat daerah yang memiliki tugas yang bersifat pelayanan publik kepada masyarakat, yang meliputi bidang Informasi. Pelayanan publik tersebut berkaitan dengan memberikan akses internet gratis, Menerima dan menyalurkan aspirasi Masyarakat kepada OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dan peningkatan penyebaran informasi secara cepat dan tepat.

Perkiraan pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat atas sasaran yang telah ditetapkan pada TA. 2021 adalah sebagai berikut :

- Sasaran strategis Meningkatnya Layanan Informasi kepada Masyarakat, pencapaian indikator kerjanya adalah :

- a. Persentase Desa yang terhubung dengan Jangkauan Telekomunikasi dan Internet dengan target 97,79%, realisasi 98,53% capaian 101%. Pada Tahun 2021 dari Jumlah 136 Pekon Kelurahan di Kabupaten Lampung Barat, Desa yang sudah terjangkau Internet dan Telekomunikasi sebanyak 134 Desa dan kelurahan, sedangkan **Pekon Batu Api Kec. Pagar Dewa, Pekon Tembelang Kec. BNS (*Blank Spot*)**
- b. Persentase Pemanfaatan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dengan target 60% realisasi 88,63% capaian 147%. Jumlah informasi yang ditayangkan sampai TA. 2021, sebanyak 886 informasi pada Video tron, Media Online, Cetak dan TV dibandingkan seluruh target informasi yang ditayangkan sebanyak 1.000 informasi.

### 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil *review* pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021 dapat dikatakan bahwa kinerja pelayanan Bidang Komunikasi dan Informatika telah berlangsung cukup baik. Namun sebagaimana umumnya yang terjadi dalam pelayanan Informasi Teknologi di pemerintah daerah diberbagai wilayah, maka masih terdapat beberapa permasalahan yang sangat krusial dalam rangka pengembangan teknologi informasi, diantaranya :

1. Pembangunan Teknologi Informasi saat ini belum didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai.
2. Kurangnya SDM di bidang Teknologi Informasi baik dilingkup Bidang Kominfo maupun seluruh Dinas Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat
3. Keterbukaan Informasi Publik pada saat ini, baik antar sektor di lingkungan pemerintahan, pemerintah dengan *stakeholders* maupun pemerintah dengan masyarakat masih belum maksimal.

Pembangunan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) menjadi skala prioritas Bidang Komunikasi dan Informatika dalam jangka menengah dan panjang, yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, di samping itu peningkatan fasilitas pendukung informasi dan komunikasi melalui media teknologi (*Media Center*) dan pengembangan Keterbukaan Informasi Publik akan memberikan nilai tambah bagi peningkatan sumberdaya manusia aparatur dalam pelaksanaan tugas-tugas

pemerintahan dan kompeten yang dapat merancang, menggunakan dan mengevaluasi pelayanan kepada masyarakat diberbagai lintas sektoral, melalui sumberdaya manusia yang metode komunikasi, pemanfaatan informasi dan teknologi pendukungnya sesuai dengan kemajuan perkembangan teknologi yang ada dengan peningkatan produktivitas, inovasi dan kolaborasi tidak hanya dilingkungan Bidang Komunikasi dan Informasi saja tetapi juga pada setiap Perangkat Daerah di Kabupaten Lampung Barat.

Meningkatkan sistem layanan pemerintahan (*e-Government*) yang terintegrasi yang mampu menciptakan sistem *e-Government* Daerah dan sekaligus bermanfaat bagi masyarakat dalam memperoleh layanan publik yang makin baik adalah salah satu tujuan dari Dinas Komunikasi dan Informatika, namun dalam mewujudkan tujuan ini sangat memerlukan dukungan dari seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yaitu dengan menyatukan persepsi bahwa pentingnya implementasi *e-Government* sebagai wujud pelayanan prima Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Kurang maksimalnya keterbukaan informasi publik antar sektor di lingkungan pemerintah daerah mengakibatkan terbatasnya koordinasi dan pengaturan sehingga menyulitkan penyelarasan pembangunan Teknologi Informasi di Kabupaten Lampung Barat.

Permasalahan lainnya adalah belum adanya kebijakan yang kuat guna mendukung implementasi *e-Government*, sulitnya koordinasi kelembagaan, sarana dan prasarana yang belum memadai, belum adanya aplikasi dan perencanaan berdasarkan penilaian berkala. Hal-hal tersebut merupakan tantangan bagi pengembangan IT di daerah dan perlu ditindaklanjuti dengan upaya penanganan yang serius demi tercapainya tujuan pengembangan IT Kabupaten Lampung Barat yaitu Terwujudnya Komunikasi dan Informasi yang Profesional Berbasis Teknologi Informasi Modern.

## **2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

*Review* terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel Lampiran.

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya, dengan memperhatikan prioritas daerah dan kemampuan keuangan daerah. Karena Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat melaksanakan tugas dan fungsi tugas yang bersifat pelayanan publik kepada masyarakat, yang meliputi bidang Informasi. Pelayanan publik tersebut berkaitan dengan memberikan akses internet gratis, menerima dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dan peningkatkan penyebaran informasi secara cepat dan tepat. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat tidak memiliki program dan kegiatan berdasarkan usulan masyarakat Lampung Barat. Hanya saja, terdapat usulan masyarakat yang diakomodir di dalam kegiatan, yaitu usulan Proposal Pemasangan Wifi di Pekon/Kecamatan.

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Arah kebijakan nasional pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) adalah penguatan manajemen komunikasi dan penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Penyelenggaraan manajemen komunikasi, diarahkan pada perwujudan penyelenggaraan komunikasi dan informatika yang efektif dan efisien dengan menggunakan sumberdaya seoptimal mungkin, mewujudkan iklim persaingan yang sehat, memenuhi standar kualitas layanan prima, serta mampu memiliki daya saing ditingkat global. Dengan harmonisasi peraturan jaringan telekomunikasi antar operator diharapkan akan terjadi partisipasi aktif dari sektor swasta dalam meningkatkan ketersediaan layanan dasar komunikasi dan informatika diseluruh penjuru Indonesia seperti telepon, siaran televisi, siaran radio, surat kabar/majalah, media tradisional, internet dan media komunikasi dan informatika yang lain melalui komitmen pembangunan yang melekat pada izin penyelenggaraannya.

#### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

##### **1. Tujuan**

Sesuai dengan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026, telah ditetapkan tujuan yang akan dicapai, yaitu :

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah yang Berbasis Informasi dan Teknologi.

##### **2. Sasaran Strategis**

Selanjutnya sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Komunikasi dan Informasi Publik, dengan Indikator Kinerja Utama:
  - a. Nilai Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)

### **3.3 Program dan Kegiatan**

#### **1. Rumusan Program dan Kegiatan**

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan perumusan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :

Sebagai OPD yang memiliki tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat adalah perangkat daerah yang memiliki tugas yang bersifat pelayanan publik kepada masyarakat, yang meliputi bidang Informasi. Pelayanan publik tersebut berkaitan dengan memberikan akses internet gratis, Menerima dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dan peningkatan penyebaran informasi secara cepat dan tepat.

1) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat adalah perangkat daerah yang memiliki tugas yang bersifat pelayanan publik kepada masyarakat, yang meliputi bidang Informasi. Pelayanan publik tersebut berkaitan dengan memberikan akses internet gratis, Menerima dan menyalurkan aspirasi Masyarakat kepada OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dan peningkatan penyebaran informasi secara cepat dan tepat.

2) Dalam rangka pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika yang berkaitan dengan Persentase Desa yang Terhubung Dengan Jangkauan Telekomunikasi dan Internet dan Persentase Pemanfaatan Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

#### **2. Rekapitulasi Program dan Kegiatan**

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, telah dirumuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2023, yaitu sebagai berikut :

### **3.4 Urusan Pemerintah wajib yang Tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar**

#### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota**

##### **A. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

###### **Sub.Kegiatan**

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7. Evaluasi Kinerja Perangkat daerah

##### **B. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

###### **Sub.Kegiatan**

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
4. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

##### **C. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**

1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

##### **D. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

###### **Sub.Kegiatan**

1. Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

##### **E. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**

###### **Sub.Kegiatan**

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
5. Fasilitas Kunjungan Tamu
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

## **F. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

### **Sub.Kegiatan**

1. Pengadaan Mebel

## **G. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

### **Sub.Kegiatan**

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

## **H. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

### **Sub.Kegiatan**

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

## **2. Program Informasi dan Komunikasi Publik**

### **A. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

#### **Sub.Kegiatan**

1. Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
2. Pengelolaan Media Komunikasi Publik
3. Pelayanan Informasi Publik
4. Layanan Hubungan Media
5. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
6. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
7. Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

## **3. Program Aplikasi dan Informatika**

### **A. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub.Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

### **Sub.Kegiatan**

1. Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain
2. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah.

## **B. Kegiatan Pengelolaan *e-goverment* di Lingkup Pemerintah Daerah**

### **Kabupaten/Kota**

#### **Sub.Kegiatan**

1. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
2. Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas
3. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah

## **4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral**

### **A. Kegiatan Penyelenggara Statistik Sektoral di Lingkup Daerah**

#### **Kabupaten/Kota**

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Desiminasi Data Statistik Sektoral
2. Peningkatan Kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi

## **5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi**

### **A. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi**

#### **Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

1. Penetapan kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi pemerintah daerah kabupaten/kota
2. Pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengolahan sumber daya keamanan informasi pemerintah kabupaten/kota
3. Pelaksanaan keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota berbasis elektronik dan non elektronik
4. Penyediaan layanan keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten / kota

## RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program dan kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika pada Tahun Anggaran 2023 serta perkiraan pendanaannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

| Kode      |           |           |             | Kegiatan/Sub.Kegiatan   | Pagu Indikatif (Rp.) |
|-----------|-----------|-----------|-------------|---|----------------------|
| <b>02</b> | <b>16</b> | <b>01</b> |             | <b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota</b>                            | <b>3.266.245.400</b> |
| <b>02</b> | <b>16</b> | <b>01</b> | <b>2.01</b> | <b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                | <b>60.433.700</b>    |
| 02        | 16        | 01        | 2.01.01     | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | 8.179.200            |
|           |           |           | 2.01.02     | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | 8.740.000            |
|           |           |           | 2.01.03     | Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                         | 6.842.000            |
|           |           |           | 2.01.04     | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  | 10.472.500           |
|           |           |           | 2.01.05     | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD  | 6.796.000            |
|           |           |           | 2.01.06     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1.000.000            |
|           |           |           | 2.01.07     | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 18.404.000           |
| <b>02</b> | <b>16</b> | <b>01</b> | <b>2.02</b> | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   | <b>2.452.603.300</b> |
|           |           |           | 2.02.01     | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | 2.447.053.300        |
|           |           |           | 2.02.05     | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun   | 2.500.000            |
|           |           |           | 2.02.07     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD       | 1.050.000            |
|           |           |           | 2.02.08     | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                        | 2.000.000            |
| <b>02</b> | <b>16</b> | <b>01</b> | <b>2.03</b> | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                         | <b>4.242.000</b>     |
|           |           |           | 2.03.01     | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                             | 4.242.000            |
| <b>02</b> | <b>16</b> | <b>01</b> | <b>2.05</b> | <b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                             | <b>24.362.000</b>    |
|           |           |           | 2.05.05     | Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai                                    | 4.362.000            |
|           |           |           | 2.05.09     | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                         | 20.000.000           |
| <b>02</b> | <b>16</b> | <b>01</b> | <b>2.06</b> | <b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                    | <b>282.807.900</b>   |
|           |           |           | 2.06.01     | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | 10.286.100           |
|           |           |           | 2.06.02     | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor  | 13.900.000           |
|           |           |           | 2.06.05     | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | 31.509.000           |
|           |           |           | 2.06.06     | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                              | 3.060.000            |
|           |           |           | 2.06.08     | Fasilitas Kunjungan Tamu  | 12.234.800           |
|           |           |           | 2.06.09     | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                  | 211.818.000          |
| <b>02</b> | <b>16</b> | <b>01</b> | <b>2.07</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>               | <b>68.889.000</b>    |
|           |           |           | 2.07.05     | Pengadaan Mebel   | 68.889.000           |
| <b>02</b> | <b>16</b> | <b>01</b> | <b>2.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                           | <b>121.372.500</b>   |
|           |           |           | 2.08.01     | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 4.350.000            |
|           |           |           | 2.08.02     | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                               | 29.200.000           |
|           |           |           | 2.08.04     | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | 87.822.500           |
| <b>02</b> | <b>16</b> | <b>01</b> | <b>2.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan</b>                 | <b>251.535.000</b>   |

|                        |           |           |             |  |                      |
|------------------------|-----------|-----------|-------------|--|----------------------|
|                        |           |           | 2.09.02     | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional atau lapangan   | 140.330.000          |
|                        |           |           | 2.09.06     | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | 39.925.000           |
|                        |           |           | 2.09.10     | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya   | 71.280.000           |
| <b>02</b>              | <b>16</b> | <b>02</b> |             | <b>Program Informasi dan Komunikasi Publik</b>   | <b>4.144.907.255</b> |
| <b>02</b>              | <b>16</b> | <b>02</b> | <b>2.01</b> | <b>Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>   | <b>4.144.907.255</b> |
|                        |           |           | 2.01.02     | Monitoring Opini dan Aspirasi Publik   | 287.474.755          |
|                        |           |           | 2.01.05     | Pengelolaan Media Komunikasi Publik  | 291.218.000          |
|                        |           |           | 2.01.06     | Pelayanan Informasi Publik   | 611.641.000          |
|                        |           |           | 2.01.07     | Layanan Hubungan Media   | 2.508.661.500        |
|                        |           |           | 2.01.10     | Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik  | 13.908.000           |
|                        |           |           | 2.01.12     | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas   | 202.056.000          |
|                        |           |           | 2.01.13     | Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                           | 229.948.000          |
| <b>02</b>              | <b>16</b> | <b>03</b> |             | <b>Program Aplikasi dan Informatika</b>  | <b>1.430.657.460</b> |
| <b>02</b>              | <b>16</b> | <b>03</b> | <b>2.01</b> | <b>Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub.Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b> | <b>248.273.460</b>   |
|                        |           |           | 2.01.02     | Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub.Domain Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                             | 49.276.000           |
|                        |           |           | 2.01.03     | Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah  | 198.997.460          |
| <b>02</b>              | <b>16</b> | <b>03</b> | <b>2.02</b> | <b>Kegiatan Pengelolaan E-government dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>  | <b>1.182.384.000</b> |
|                        |           |           | 2.02.07     | Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik   | 78.000.000           |
|                        |           |           | 2.02.09     | Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas   | 627.665.000          |
|                        |           |           | 2.02.10     | Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah  | 476.719.000          |
| <b>2</b>               | <b>20</b> | <b>02</b> |             | <b>Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral</b>  | <b>143.959.200</b>   |
| <b>2</b>               | <b>20</b> | <b>02</b> | <b>2.01</b> | <b>Kegiatan Penyelenggara Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>  | <b>143.959.200</b>   |
|                        |           |           | 2.01.01     | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Desiminasi Data Statistik Sektoral   | 122.807.200          |
|                        |           |           | 2.01.02     | Peningkatan Kapasitas SDM Pemda Dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi  | 21.152.000           |
| <b>2</b>               | <b>21</b> | <b>02</b> |             | <b>Urusan Pemerintah Bidang Persandian</b>   | <b>438.880.950</b>   |
| <b>2</b>               | <b>21</b> | <b>02</b> | <b>2.01</b> | <b>Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota</b>  | <b>438.880.950</b>   |
|                        |           |           | 2.01.01     | Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                | 100.088.200          |
|                        |           |           | 2.01.02     | Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengolahan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Kabupaten/Kota   | 135.767.750          |
|                        |           |           | 2.01.03     | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik   | 80.117.000           |
|                        |           |           | 2.01.04     | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota   | 122.908.000          |
| <b>Jumlah Anggaran</b> |           |           |             |  | <b>9.424.650.265</b> |

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana penanganan dampak Covid 19 untuk tahun 2023.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat melalui kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, mengadakan Kerjasama Digital Media dalam hal Media Layanan Informasi Publik bagi masyarakat, Operasional Tim Bankom dan Pelayanan *Call* 112 akan selalu siap memberikan Informasi kepada masyarakat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Demikianlah uraian Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2023, sebagai rencana tahunan dan bagian dari perencanaan stratejik dan rencana umum jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026.

Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2023 ini berisi program-program prioritas yang direncanakan dilaksanakan langsung oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat sesuai dengan tugas dan fungsinya, diemban oleh seluruh aparatur, dibiayai oleh APBD Kabupaten Lampung Barat dan diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat. Pada tahap pembahasan nanti, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Lampung Barat yang akan mempertimbangkannya dengan melihat prioritas daerah dan kemampuan keuangan daerah.

Liwa,      Februari 2022

Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Lampung Barat,

  
**MUNANDAR, S.Sos**  
PEMBINA TK I/IV.b  
NIP. 19700724 199603 1 003



|   |    |    |         |  |  |      |                     |      |      |      |        |      |      |      |
|---|----|----|---------|--|--|------|---------------------|------|------|------|--------|------|------|------|
| 2 | 16 | 01 | 2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                             | Jumlah Listrik Bangunan Kantor yang disediakan   | 5    | Jenis               | 9    | 11   | 11   | 100    | 11   | 11   | 220% |
| 2 | 16 | 01 | 2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Jumlah Peralatan Perlengkapan Kantor yang disusun 3jenis                                       | 9    | Jenis               | 3    | 5    | 5    | 100    | 5    | 5    | 56%  |
| 2 | 16 | 01 | 2.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | Jumlah Barang dan Penggandaan yang sediakan  | 8    | Jenis               | 9    | 11   | 11   | 100    | 11   | 11   | 138% |
| 2 | 16 | 01 | 2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                     | Jumlah Penyediaan barang bacaan dan peraturan perundang-undangan 3 SKHU                        | 3    | SKHU                | 3    | 3    | 3    | 100    | 3    | 3    | 100% |
| 2 | 16 | 01 | 2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu  | Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Bulan  | 60   | Bulan               | 36   | 12   | 12   | 100    | 12   | 12   | 20%  |
| 2 | 16 | 01 | 2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | Jumlah Koordinasi Konsultasi SKPD 12 Bulan   | 60   | Bulan               | 36   | 12   | 12   | 100    | 12   | 12   | 20%  |
| 2 | 16 | 01 | 2.07    | <b>Pengadaan barang Milik Daerah</b>   | <b>Jumlah Pengadaan barang Milik Daerah</b>  | 53   | unit                | 53   | 2    | 2    | 100,00 | 2    | 2    |      |
|   |    |    | 2.07.05 | Pengadaan Mebel  | Jumlah Mebel 4 Jenis   | 53   | unit                | 53   | 2    | 2    | 100    | 2    | 2    | 4%   |
| 2 | 16 | 01 | 2.08    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                  | <b>Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                             | 3    | Sub                 | 3    |      |      |        |      |      |      |
|   |    |    | 2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Terlaksananya penyediaan Administrasi Surat Menyurat Target 12 Bulan, Realisasi 12 Bulan       | 7500 | Surat masuk, keluar | 3491 | 1500 | 1100 | 73     | 1500 | 1500 | 20%  |
|   |    |    | 2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                      | Terlaksananya Pembayaran Rekening Telepon, Air dan Listrik target 12 bulan, realisasi 12 bulan | 4    | Rek                 | 4    | 4    | 4    | 100    | 5    | 5    | 125% |
|   |    |    | 2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 4 Sub Oraganisasi                                 | 4    | Sub Organisasi      | 3    | 3    | 3    | 100    | 3    | 3    | 75%  |
| 2 | 16 | 01 | 2.09    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan</b>                        | <b>Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan</b>                   | 3    | sub                 |      |      |      |        |      |      |      |
| 2 | 16 | 01 | 2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional                       | Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 10 unit          | 10   | unit                | 10   | 10   | 10   | 100    | 10   | 10   | 100% |
| 2 | 16 | 01 | 2.09.02 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah Peralatan Mesin Lainnya yang disusun yang dipelihara 19 unit                            | 19   | unit                | 19   | 9    | 9    | 100    | 9    | 9    | 47%  |
| 2 | 16 | 01 | 2.09.04 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           | Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan 2 Gedung     | 2    | gedung              | 2    | 2    | 2    | 100    | 2    | 2    | 100% |
| 2 | 16 | 02 |         | <b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>   | <b>Persentase Penyebaran Keterbukaan Informasi Publik</b>                                      | 100% |                     |      |      |      |        |      |      |      |
| 2 | 16 | 02 | 2.01    | <b>Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b> | <b>Jumlah Pemerintah Daerah Kabupaten Kabupaten Kota yang disusun 8 jenis</b>                  | 6    | Sub Keg             | 6    | 6    | 6    | 100    | 6    | 6    |      |
| 2 | 16 | 02 | 2.01.02 | monitoring opini dan aspirasi publik (Mobil Pacik+SMS Center)                                | Jumlah Kunjungan Mobil Penerangan Aspirasi Cerdas Informatik Keliling                          | 140  | kunjungan           | 75   | 25   | 25   | 100    | 25   | 67   | 48%  |
|   |    |    |         |  | Jumlah SMS Center  | 150  | kali                | 72   | 24   | 67   | 279    | 24   | 24   | 16%  |

|   |    |    |         |  |  |                  |           |           |           |            |           |           |       |
|---|----|----|---------|--|--|------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-------|
| 2 | 16 | 02 | 2.01.05 | Pengelolaan Media Komunikasi Publik  | Jumlah Pengelolaan Media Komunikasi Publik 12 Bulan  | 36 bulan         | 365       | 365       | 365       | 100        | 365       | 365       | 1014% |
| 2 | 16 | 02 | 2.01.06 | Pelayanan Informasi Publik   | Jumlah tayangan  | 184 kali         | 136       | 48        | 48        | 100        | 48        | 48        | 26%   |
|   |    |    |         |  | Pembuatan Baliho   | 4761 buah        | 2.377     | 280       | 280       | 100        | 280       | 280       | 6%    |
|   |    |    |         |  | Jumlah Alat Studio   | 40 unit          | 25        |           |           |            |           |           |       |
| 2 | 16 | 02 | 2.01.07 | Layanan hubungan Media   | Jumlah Kerjasama Media Cetak dan Online  | 604 Kali         | 903       | 302       | 302       | 100        | 302       | 302       | 50%   |
|   |    |    |         |  | Jumlah Kerjasama Media   | 180 Kerjasama    | 138       | 24        | 24        | 100        | 24        | 24        | 13%   |
| 2 | 16 | 02 | 2.01.10 | Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik  | Jumlah Pembuatan Film Pedek 1 Kali   | 4 kl             | 1         | 1         | 1         | 100        | 1         | 1         | 25%   |
| 2 | 16 | 02 | 2.01.12 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas   | Jumlah Penyelenggaraan Informasi Daerah dan Peliputan 155 Paket  | 310 paket        | 0         | 155       | 155       | 100        | 155       | 155       | 50%   |
| 2 | 16 | 03 |         | <b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>  | <b>Jumlah Perangkat Daerah yang Memanfaatkan TIK 44 PD</b>   | <b>44 PD</b>     | <b>44</b> | <b>44</b> | <b>44</b> | <b>100</b> | <b>44</b> | <b>44</b> |       |
| 2 | 16 | 03 | 2.01    | <b>Kegiatan Pengelolaan nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub.Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b> | <b>Jumlah Domain dan Sub-Domain yang terpelihara, OPD yang Terhubung dengan Jaringan Intra, 1 Domaian, 52 Sub Domaian, 1 OPD</b> | <b>27 OPD</b>    | <b>27</b> | <b>27</b> | <b>27</b> | <b>100</b> | <b>27</b> | <b>27</b> |       |
| 2 | 16 | 03 | 2.01.02 | Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                             | Jumlah 1 Domain dan 52 Sub-Domain yang Terpelihara   | 52 domain        | 52        | 52        | 52        | 100        | 52        | 52        | 100%  |
| 2 | 16 | 03 | 2.01.03 | Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah daerah  | Jumlah OPD yang Terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah 1 OPD  | 1 OPD            | 1         | 1         | 1         | 100        | 1         | 1         | 100%  |
| 2 | 16 | 03 | 2.02    | <b>Kegiatan Pengelolaan e-government dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>  | <b>Jumlah Pengelolaan Egovernment</b>  | <b>8 Sub.Keg</b> | <b>8</b>  | <b>8</b>  | <b>8</b>  | <b>100</b> | <b>8</b>  | <b>8</b>  |       |
| 2 | 16 | 03 | 2.02.03 | Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah   | Jumlah Pengelolaan Pusat Data 1 Aplikasi   | 5 Aplikasi       | 3         | 1         | 1         | 100        | 1         | 1         | 20%   |
| 2 | 16 | 03 | 2.02.04 | Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah  | Jumlah PD pengguna Aplikasi Surat Elektronik 1 Aplikasi  | 2 Aplikasi       | 0         | 1         | 1         | 100        | 1         | 1         | 50%   |
| 2 | 16 | 03 | 2.02.05 | Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi  | Jumlah Dokumen Laporan 1 Dokumen   | 2 Aplikasi       | 0         | 1         | 1         | 100        | 1         | 1         | 50%   |
| 2 | 16 | 03 | 2.02.06 | Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik  | Jumlah Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Informasi Elektronik 1 Dokumen  | 2 Aplikasi       | 0         | 1         | 1         | 100        | 1         | 1         | 50%   |
| 2 | 16 | 03 | 2.02.07 | Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik   | Jumlah Aplikasi Kependudukan dan Kepegawaian 1 Aplikasi  | 2 Aplikasi       | 0         | 1         | 1         | 100        | 1         | 1         | 50%   |
| 2 | 16 | 03 | 2.02.08 | Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah   | Jumlah 1 Dokumen   | 2 Aplikasi       | 0         | 1         | 1         | 100        | 1         | 1         | 50%   |
| 2 | 16 | 03 | 2.02.09 | Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas   | Jumlah Call center 112, Command Center, Dokumen Perencanaan smart City 1 Aplikasi  | 7 Aplikasi       | 0         | 1         | 1         | 100        | 1         | 1         | 14%   |
| 2 | 16 | 03 | 2.02.10 | Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah  | Jumlah Rekening Internet yang dibayar 7 Rekening Menara Telekomunikasi yang Terawasi 101 Tower                                   | 7 Rekening       | 7         | 7         | 7         | 100        | 7         | 7         | 100%  |

|   |    |    |         |   |  |            |       |     |     |      |     |     |      |
|---|----|----|---------|---|--|------------|-------|-----|-----|------|-----|-----|------|
|   |    |    |         |   | Jumlah Menara Telekomunikasi yang Terawasi 101 Tower                               | 90 Unit    | 90    | 90  | 101 | 112  | 90  | 106 | 118% |
| 2 | 20 | 02 |         | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>   | <b>Jumlah Buku LBDA dan PDRB, Buku Promosi (Kopi) Investasi 150 Buku</b>           | 3 data     | 3     |     |     |      |     |     |      |
| 2 | 20 | 02 |         | <b>Kegiatan Penyelenggara Statistik Sektoral di lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>                               | <b>Jumlah Dokumen, Jumlah Buku LBDA, PDRB, Promosi Investasi (Kopi) 150 Buku</b>   | 2500 Buku  | 1.450 | 150 | 150 | 100  | 150 | 150 | 6%   |
| 2 | 20 | 2  | 2.01.01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Desiminasi Data Statistik Sektoral            | Jumlah Dokumen, Jumlah Buku LBDA, PDRB, Promosi Investasi (Kopi) 150 Buku          | 2500 Buku  | 1.450 | 150 | 150 | 100  | 150 | 150 | 6%   |
| 2 | 20 | 2  | 2.01.02 | Peningkatan Kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi                       | Jumlah SDM   | 120 orang  | 40    | 0   | 0   | 0,00 | 0   | 0   | 0%   |
| 2 | 21 |    |         | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>  | <b>Jumlah Seluruh Informasi / Jumlah seluruh yang diamankan 5 model Persandian</b> | 5 data     | 5     | 5   | 5   | 100  | 5   | 5   |      |
| 2 | 21 | 02 |         | <b>Kegiatan Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten / Kota</b>        | <b>Jumlah Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah 3 Sub Organisasi</b>              | 3 sub.keg  | 3     | 3   | 3   | 100  | 3   | 3   |      |
| 2 | 21 | 2  | 2.01.01 | Penetapan kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi pemerintah daerah kabupaten/kota | Jumlah Peserta Sosialisasi   | 180 orang  | 60    | 0   | 0   | 0    | 0   | 0   | 0%   |
|   |    |    | 2.01.02 | Pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi pemerintah kabupaten/kota         | Peralatan Sandi yang Terpantau 15 Kec  | 15 Kec     | 15    | 15  | 15  | 100  | 15  | 15  | 100% |
| 2 | 21 | 2  | 2.01.02 | Pelaksanaan keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota berbaris elektronik dan Non elektronik          | Jumlah Ruang Pimpinan yang diamankan 3 Ruang                                       | 12 ruang   | 4     | 3   | 3   | 100  | 3   | 3   | 25%  |
| 2 | 21 | 2  | 2.01.03 | Penyediaan layanan keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten / kota  | Jumlah Tower   | 16 Tower   | 10    | 6   | 6   | 100  | 6   | 6   | 38%  |
|   |    |    |         |   | sarana komunikasi radio  | 49 Unit    | 17    | 3   | 3   | 100  | 3   | 3   | 6%   |
|   |    |    |         |   | Pengamanan Informasi   | 36 Bulan   | 12    | 12  | 12  | 100  | 12  | 12  | 33%  |
| 2 | 21 | 02 |         | <b>Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antara Perangkat Daerah Kabupaten/Kota</b>                          | <b>Jumlah hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah kabupaten / kota</b>    | 18 petugas | 6     | 11  | 11  | 100  | 11  | 11  |      |
| 2 | 21 | 02 | 2.02.01 | Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota                                  | Jumlah Petugas Bankom  | 18 petugas | 18    | 11  | 11  | 100  | 11  | 11  |      |

Disusun  
Liwa, 2022  
Pit KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,  
MUNANDAR, S.Sos  
Pembina - Tk. II / IV.b  
NIP.19700724 199603 1 003

Dievaluasi  
Liwa, 2022  
KEPALA BAPPEDA KABUPATEN  
LAMPUNG BARAT,  
AGUSTANTO BASMAR, SP. M.Si  
NIP. 196903021998031007













**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Lampung Barat  
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.13.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika  
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.13.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

| Kode         | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Indikator Kinerja |                       |                | Rencana Tahun 2023   |  |   |                   |  | Catatan<br>Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 |                        |             |  |                       |  |          |             |
|--------------|--|-------------------|-----------------------|----------------|--|--|---|-------------------|--|--------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------|--|-----------------------|--|----------|-------------|
|              |  | Capaian Program   | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi<br>Output<br>Kegiatan   | Target Capaian Kinerja                           |   |                   | Pagu Indikatif<br>(Rp.)                              |                    | Sumber<br>Dana                    | Target Capaian Kinerja |             | Kebutuhan Dana/<br>Pagu Indikatif<br>(Rp.) |                       |  |          |             |
|              |  |                   |                       |                |  | Program  | Keluaran<br>Sub<br>Kegiatan   | Hasil<br>Kegiatan |  |                    |                                   | Tolok Ukur             | Target      |  |                       |  |          |             |
| 2            | 21   | 02                | 2.01                  | 03             | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | prosentase Jenis Komunikasi Sandi yang diamankan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | Nilai Indeks SPBE | Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100,00 %           | 6 Laporan                         | 2 poin                 | 80,117,000  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum       |                       | prosentase Jenis Komunikasi Sandi yang diamankan | 100,00 % | 170,000,000 |
| 2            | 21   | 02                | 2.01                  | 04             | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                   | prosentase Jenis Komunikasi Sandi yang diamankan | Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi   | Nilai Indeks SPBE | Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100,00 %           | 15 Perangkat Daerah               | 2 poin                 | 122,908,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum       |                       | prosentase Jenis Komunikasi Sandi yang diamankan | 100,00 % | 190,000,000 |
| <b>TOTAL</b> |  |                   |                       |                |  |  |   |                   |  |                    |                                   | <b>9,424,650,265</b>   |             |  | <b>11,191,133,770</b> |  |          |             |